

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan pada bagian pendahuluan di atas, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

- 1) Status keberlanjutan hutan rakyat cempaka di Minahasa dari 5 (lima) dimensi yang dikaji berada pada status kurang berkelanjutan dengan nilai indeksnya adalah sebesar 45,08. Terdapat 15 atribut yang mampu memberikan pengaruh sensitif terhadap status keberlanjutannya yaitu atribut penutupan lahan bervegetasi cempaka, pengetahuan konservasi lahan kritis, metode penjualan cempaka, pendapatan dari cempaka, posisi tawar perantara (tengkulak), ketersediaan pasar, ketergantungan terhadap pohon cempaka, pengetahuan hutan lestari, penggunaan kayu cempaka untuk rumah adat, penggunaan sehari-hari kayu cempaka, keberadaan penyuluh swadaya, keberadaan penyuluh pemerintah, lembaga keuangan mikro, akses mendapatkan bibit dan standar kualitas kayu cempaka.
- 2) Formula skenario yang dapat diterapkan untuk meningkatkan status keberlanjutan pengelolaan hutan rakyat cempaka di Minahasa adalah skenario pembangunan berkelanjutan. Skenario ini mampu meningkatkan status keberlanjutan hutan rakyat cempaka di Minahasa dari status kurang berkelanjutan (45,08) menjadi cukup berkelanjutan (55,69). Penjabaran skenario tersebut dapat dijelaskan dengan beberapa rencana aksi, yaitu :
  - a. Kebijakan peningkatan cara penjualan kayu cempaka, beberapa rancangan rencana aksinya antara lain peningkatan pemahaman petugas lapangan terkait tata usaha kayu cempaka, pendampingan terhadap petani dalam pemanenan hasil kayu cempaka, dan penerbitan surat keputusan dari kepala dinas kehutanan provinsi Sulawesi Utara terkait pengelompokan cempaka sebagai jenis tanaman budidaya,

- b. Kebijakan penurunan peran perantara, beberapa rancangan rencana aksinya antara lain pembuatan skema pembiayaan bagi petani cempaka, pembentukan koperasi petani cempaka, peningkatan kegiatan penyuluhan, sosialisasi dan pendampingan terhadap petani agar terhindar dari tengkulak, dan pengembangan program kredit tunda tebang
- c. Kebijakan peningkatan ketersediaan pasar kayu cempaka, beberapa rancangan rencana aksinya antara lain membangun sistem tata niaga kayu cempaka dan mendorong penerbitan kayu bersertifikat.
- d. Kebijakan peningkatan pengetahuan kelestarian hutan, beberapa rancangan rencana aksinya antara lain peningkatan peran penyuluh pemerintah dan penyuluh swadaya, peningkatan kapasitas petani dalam hal konservasi dan pengembangan hutan rakyat cempaka, penyampaian informasi tentang pengaturan pola pemeliharaan tanaman cempaka dengan silvikultur intensif, serta penyampaian informasi mengenai pola agroforestri yang dapat memberikan optimalisasi hasil,
- e. Kebijakan peningkatan peran penyuluh, beberapa rancangan rencana aksinya antara lain penyusunan program penyuluhan yang tepat sasaran, peningkatan kapasitas dan etos kerja penyuluh, pembuatan surat keputusan terkait keberadaan penyuluh swadaya, dan pendampingan yang intensif oleh penyuluh pemerintah.
- f. Kebijakan peningkatan kemudahan akses memperoleh bibit cempaka, beberapa rancangan rencana aksinya antara lain prioritas program KBR (Kebun Bibit Rakyat) untuk jenis bibit cempaka, pemberian subsidi bagi para pengada bibit cempaka di desa-desa, pemberian kemudahan bagi kelompok untuk membuat persemaian melalui kerjasama dengan persemaian permanen, pemberian subsidi biaya transportasi untuk pengambilan bibit di Persemaian Permanen bagi masyarakat/kelompok yang akan menanam cempaka, pemberian informasi terkait pembibitan cempaka, serta inventarisasi dan pemetaan pengelola hutan rakyat cempaka.

- g. Kebijakan peningkatan standar kualitas kayu cempaka, beberapa rancangan rencana aksinya antara lain penetapan standar kayu cempaka, pengembangan teknologi pemuliaan cempaka, dan evaluasi pelaksanaan penerapan standar.

## **5.2. Saran**

### **5.2.1. Saran Praktis**

- 1) Skenario kebijakan pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan dengan menggunakan prinsip kelestarian hutan dan kelestarian usaha dapat diterapkan dalam mengelola hutan rakyat cempaka di Minahasa.
- 2) Perlu dilakukan kerjasama oleh semua pihak yang terencana dan terarah terutama antara lembaga pemerintah yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara dan instansi terkait lainnya dengan masyarakat selaku pemilik kawasan hutan rakyat cempaka dalam pelaksanaan skenario pengelolaan hutan berkelanjutan yang dihasilkan agar tujuan pengelolaan hutan rakyat cempaka di Minahasa secara berkelanjutan dapat tercapai.

### **5.2.2. Saran Akademik**

- 1) Ketepatan penentuan atribut dalam menilai status keberlanjutan perlu menjadi perhatian khusus dalam modifikasi analisis *Rapfish* sehingga hasil yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang sesuai pada sistem keberlanjutan yang diukur.
- 2) Penyusunan skenario kebijakan pengelolaan hutan rakyat cempaka dapat menggunakan tambahan analisis *stakeholder* terkait melalui FGD (*Focus Group Discussion*). Pada FGD dibahas mengenai faktor-faktor yang harus diperhatikan (tantangan dan peluang) dan strategi implementasi untuk keberhasilan skenario.

## VI. RINGKASAN

### SKENARIO KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT CEMPAKA (*Magnolia spp.*) SECARA BERKELANJUTAN DI MINAHASA, SULAWESI UTARA

#### Latar Belakang

Keberadaan hutan sebagai sebuah elemen yang sangat penting dalam sistem tata kehidupan sepatutnya harus dipertahankan secara maksimal dan dijaga daya dukungnya secara berkelanjutan. Data dari KLHK (2018) menyebutkan bahwa kawasan hutan di Indonesia terus mengalami penurunan luas tutupan lahan, termasuk di daerah Sulawesi Utara. Pembangunan hutan rakyat menjadi solusi alternatif yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan fungsi kawasan hutan. Namun disayangkan kondisi tersebut tidak dapat terpenuhi karena hutan rakyat di provinsi Sulawesi Utara juga terus mengalami pengurangan luasan. Pembangunan hutan rakyat oleh masyarakat Sulawesi Utara pada dasarnya telah dilakukan sejak lama. Jenis hutan rakyat yang dikembangkan juga beragam, namun hutan rakyat cempaka merupakan jenis tanaman yang lebih banyak dipilih masyarakat. Konversi hutan rakyat menjadi lahan untuk peruntukan lain yang terjadi di Sulawesi Utara khususnya daerah Minahasa telah memberikan dampak terhadap kondisi lingkungan. Upaya menjaga kawasan DAS dalam mencegah kejadian bencana banjir dan longsor di wilayah Manado dan Minahasa perlu dilakukan agar kejadian tersebut tidak terus terulang. Prinsip pengelolaan hutan rakyat secara berkelanjutan dapat diterapkan sebagai salah satu solusinya. Penelitian ini bertujuan :

- 1) Menganalisis tingkat keberlanjutan dan variabel berpengaruh dalam pengelolaan hutan rakyat cempaka di Minahasa (aspek ekologi, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek kelembagaan dan aspek aksesibilitas dan teknologi)
- 2) Memformulasikan skenario kebijakan pengelolaan hutan rakyat cempaka di Minahasa

## **Tinjauan Pustaka**

Hutan merupakan sumber daya alam yang menjadi salah satu penentu sistem penyangga kehidupan yang keberadaannya harus dipertahankan secara optimal dan dijaga daya dukungnya secara berkelanjutan. Kegiatan ilegal dan tidak berkelanjutan terhadap hutan beberapa dekade terakhir telah merusak hutan dalam skala besar dari hari ke hari (Kayet et al., 2016). Hutan rakyat adalah sebuah kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat, berada pada tanah hak milik atau tanah hak adat (Sukwika et al., 2016). Hutan rakyat yang terbangun dengan baik diharapkan dapat menggantikan fungsi kawasan hutan negara yang semakin menurun fungsinya. Hutan rakyat yang didukung oleh kebijakan pemerintah dapat menjadi kekuatan serta memiliki peluang dan potensinya pengembangan yang sangat besar (Widiyanto dkk. 2012).

Prinsip pengelolaan hutan rakyat yang baik biasa dikenal dengan prinsip pengelolaan hutan rakyat secara lestari dengan mempertimbangkan fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya. Namun disayangkan implementasi pengelolaan hutan rakyat secara lestari belum banyak dapat terlaksana secara ideal karena adanya beberapa kendala yang terjadi di lapangan. Purbawiyatna dkk (2012) menyatakan bahwa pengelolaan hutan rakyat lestari atau berkelanjutan belum didukung dengan kerangka kebijakan yang sesuai terutama terkait dengan kejelasan dalam status hukum hutan milik, kelembagaan pengelolaan hutan, teknis pengelolaan hutan serta kerangka insentif yang diperlukan. Kebijakan yang terkait dengan hutan rakyat dapat berupa peraturan dan program/kegiatan, namun selama ini peraturan yang tepat belum dapat menjembatani hal tersebut baik yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Fauziah & Sanudin, 2017). Upaya yang dapat dilakukan untuk dapat mendukung pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan adalah melalui pembentukan alternatif kebijakan yang sesuai melalui penyusunan skenario untuk memberikan pilihan dari kondisi faktual yang terjadi.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian diskriptif yaitu penelitian dengan tahapan mengumpulkan data dari kondisi sebenarnya dengan tujuan untuk mengetahui faktor dan sifat dari fenomena di masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober-Desember 2021. Lokasi penelitian adalah di daerah Minahasa yang meliputi Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kota Tomohon. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data-data tersebut mencakup atribut-atribut yang terkait dengan keberlanjutan pengelolaan hutan rakyat cempaka dan juga data-data untuk menyusun skenario kebijakan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dan mendalam (*in depth interview*), diskusi, observasi lapangan, telaah dokumen, kajian literatur dan penelitian serta kuesioner. Penelitian ini merupakan penelitian campuran (gabungan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif) dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian mengenai tingkat keberlanjutan hutan rakyat cempaka di daerah Minahasa ini adalah menggunakan Multidimensional scaling (MDS) dengan alat analisis *Rap-Pforest (Rapid Appraisal for Private-Forest)* yang merupakan modifikasi dari *Rapfish (Rapid Appraisal for Fisheries)*. Sedangkan untuk menyusun skenario kebijakan yang sesuai digunakan analisis prospektif.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Status keberlanjutan dan variabel berpengaruh**

Nilai keberlanjutan hutan rakyat cempaka di Minahasa dari dimensi ekologi adalah sebesar 53,91% (cukup berkelanjutan), dimensi ekonomi sebesar 36,63 (kurang berkelanjutan), dimensi sosial & budaya sebesar 59,22 (cukup berkelanjutan), dimensi kelembagaan sebesar 35,50 (kurang berkelanjutan), dan dimensi akses & teknologi sebesar 40,12 (kurang berkelanjutan). Beberapa variabel yang memberikan pengaruh yaitu penutupan lahan bervegetasi cempaka, pengetahuan konservasi lahan kritis, metode penjualan cempaka, pendapatan dari

campaka, posisi tawar perantara (tengkulak), ketersediaan pasar, ketergantungan terhadap pohon campaka, pengetahuan hutan lestari, penggunaan kayu campaka untuk rumah adat, penggunaan sehari-hari kayu campaka, keberadaan penyuluh swadaya, keberadaan penyuluh pemerintah, akses mendapatkan bibit dan standar kualitas kayu campaka. Penentuan variabel berpengaruh tersebut menggunakan hukum nilai tengah. Yusuf dkk., (2021) menyatakan bahwa hukum penentuan atribut sensitif menggunakan nilai tengah ditetapkan atas dasar nilai diatas rata-rata dari atribut yang memiliki nilai RMS tertinggi. Variabel berpengaruh merupakan variabel yang jika mengalami perubahan maka akan mudah berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan nilai indeks keberlanjutannya. Sebaliknya variabel yang memiliki nilai RMS dibawah nilai tengahnya berarti bahwa atribut-atribut ini memiliki pengaruh yang cukup rendah terhadap nilai keberlanjutan yang diperoleh.

### **Formulasi skenario pengelolaan hutan rakyat campaka**

Secara konseptual terdapat 3 (tiga) skenario yang akan dihasilkan dari penelitian ini, yaitu (1) skenario masa depan dengan prinsip *eco efficiency* (kelestarian hutan); (2) skenario maksimalisasi nilai dengan prinsip efisiensi pasar (kelestarian usaha); dan (3) skenario pembangunan keberlanjutan atau skenario *hybrid* yang merupakan campuran dari skenario (1) dan (2). Formula skenario yang dapat diterapkan untuk meningkatkan status keberlanjutan pengelolaan hutan rakyat campaka di Minahasa adalah skenario pembangunan berkelanjutan. Skenario ini mampu meningkatkan status keberlanjutan hutan rakyat campaka di Minahasa dari status kurang berkelanjutan (45,08) menjadi cukup berkelanjutan (55,69). Skenario tersebut difokuskan pada beberapa rancangan rencana aksi untuk kebijakan peningkatan cara penjualan kayu campaka, kebijakan penurunan peran perantara, kebijakan peningkatan ketersediaan pasar kayu campaka, kebijakan peningkatan pengetahuan kelestarian hutan, kebijakan peningkatan peran penyuluh, kebijakan peningkatan kemudahan akses memperoleh bibit campaka, dan kebijakan peningkatan standar kualitas kayu campaka. Penjabaran skenario tersebut dapat dijelaskan dengan beberapa rencana aksi, yaitu :

- a. Kebijakan peningkatan cara penjualan kayu cempaka, beberapa rancangan rencana aksinya antara lain peningkatan pemahaman petugas lapangan terkait tata usaha kayu cempaka, pendampingan terhadap petani dalam pemanenan hasil kayu cempaka, dan penerbitan surat keputusan dari kepala dinas kehutanan provinsi Sulawesi Utara terkait pengelompokan cempaka sebagai jenis tanaman budidaya,
- b. Kebijakan penurunan peran perantara, beberapa rancangan rencana aksinya antara lain pembuatan skema pembiayaan bagi petani cempaka, pembentukan koperasi petani cempaka, peningkatan kegiatan penyuluhan, sosialisasi dan pendampingan terhadap petani agar terhindar dari tengkulak, dan pengembangan program kredit tunda tebang
- c. Kebijakan peningkatan ketersediaan pasar kayu cempaka, beberapa rancangan rencana aksinya antara lain membangun sistem tata niaga kayu cempaka dan mendorong penerbitan kayu bersertifikat.
- d. Kebijakan peningkatan pengetahuan kelestarian hutan, beberapa rancangan rencana aksinya antara lain peningkatan peran penyuluh pemerintah dan penyuluh swadaya, peningkatan kapasitas petani dalam hal konservasi dan pengembangan hutan rakyat cempaka, penyampaian informasi tentang pengaturan pola pemeliharaan tanaman cempaka dengan silvikultur intensif, serta penyampaian informasi mengenai pola agroforestri yang dapat memberikan optimalisasi hasil,
- e. Kebijakan peningkatan peran penyuluh, beberapa rancangan rencana aksinya antara lain penyusunan program penyuluhan yang tepat sasaran, peningkatan kapasitas dan etos kerja penyuluh, pembuatan surat keputusan terkait keberadaan penyuluh swadaya, dan pendampingan yang intensif oleh penyuluh pemerintah.
- f. Kebijakan peningkatan kemudahan akses memperoleh bibit cempaka, beberapa rancangan rencana aksinya antara lain prioritas program KBR (Kebun Bibit Rakyat) untuk jenis bibit cempaka, pemberian subsidi bagi para pengada bibit cempaka di desa-desa, pemberian kemudahan bagi kelompok untuk membuat persemaian melalui kerjasama dengan persemaian permanen,

pemberian subsidi biaya transportasi untuk pengambilan bibit di Persemaian Permanen bagi masyarakat/kelompok yang akan menanam cempaka, pemberian informasi terkait pembibitan cempaka, serta inventarisasi dan pemetaan pengelola hutan rakyat cempaka.

- g. Kebijakan peningkatan standar kualitas kayu cempaka, beberapa rancangan rencana aksinya antara lain penetapan standar kayu cempaka, pengembangan teknologi pemuliaan cempaka, dan evaluasi pelaksanaan penerapan standar.